



Pengaruh Peningkatan Indikator Pendidikan Terhadap Kedalaman Kemiskinan dengan Belanja Modal Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi

The Effect of Improving Education Indicators on Poverty Depth with Education Capital Expenditure as a Moderating Variable

Fachryza Abimanyu¹, Rinaldi Rustam², Mona Adriana Sutrisno³

^{1,2,3}Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jakarta

Email: *1fachryzaabimanyu97@gmail.com 2rinaldi.rustam@trisakti.ac.id 3mona.as@trisakti.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 9 September 2025

Accepted: 17 Maret 2026

Published: 18 Maret 2026

Keywords: *ALS; SIP; SIC-C;*

ECE; PDI

DOI: 10.37859/jae.v15i2.10145

JEL Classification: H5, I2, I3

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat dengan Belanja Modal Pendidikan (BMP) sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan data time series 2017–2024 serta cross-section dari 7 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian menunjukkan RLS, PIP, dan BMP berpengaruh negatif signifikan terhadap IKK, sedangkan KIP-K berpengaruh positif namun tidak signifikan. Uji moderasi menunjukkan BMP tidak mampu memoderasi pengaruh RLS terhadap IKK, tetapi signifikan memoderasi pengaruh PIP. Sementara itu, BMP tidak mampu memoderasi pengaruh KIP-K terhadap IKK.

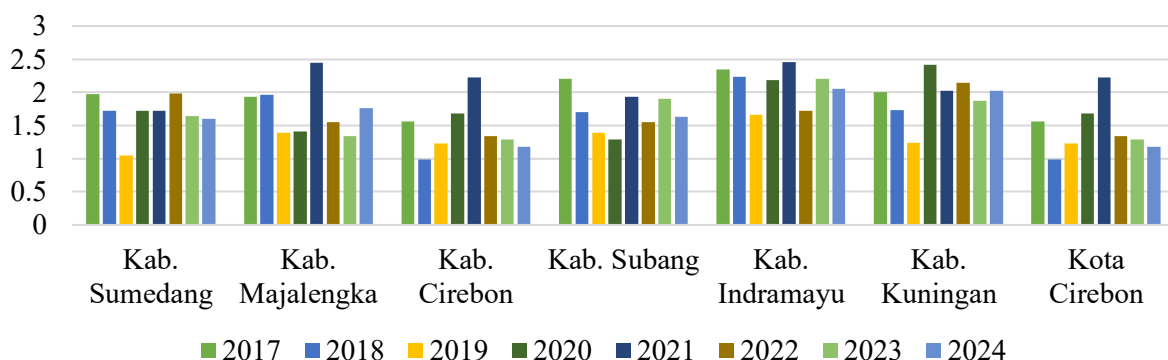
This study analyzes the effect of Average Years of Schooling (RLS), Smart Indonesia Program (PIP), and Smart Indonesia College Card (KIP-K) on the Poverty Depth Index (IKK) in the Rebana area of West Java with Education Capital Expenditure (BMP) as a moderating variable. The method used is panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with 2017–2024 time series data and cross-sections from 7 regencies/cities. The results show that RLS, PIP, and BMP have a significant negative effect on IKK, while KIP-K has a positive but insignificant effect. The moderation test shows that BMP is unable to moderate the effect of RLS on IKK, but significantly moderates the effect of PIP. Meanwhile, BMP is unable to moderate the effect of KIP-K on IKK.

PENDAHULUAN

Setiap negara selalu berusaha menuntaskan permasalahan kemiskinan, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah struktural yang perlu diatasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam konteks ini, pemerintah memegang peran krusial dan bertanggung jawab dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah terus memantau angka kemiskinan yang disebabkan oleh berbagai pengaruh, kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang relatif rendah, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya, rendahnya daya serap tenaga kerja tetap menjadi tantangan utama bagi banyak masyarakat dalam berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, khususnya pada aspek ekonomi (Takasaping *et al.*, 2023).

Kemiskinan juga termasuk fenomena sosial yang menjadi isu sentral dalam perencanaan kebijakan pembangunan di tiap negara, termasuk Indonesia. (Todaro dan Smith, 2020). Indonesia adalah negara yang termasuk mempunyai kepadatan penduduk terbanyak ke empat didunia, yakni lebih dari 270 juta jiwa, dan hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terlepas dari adanya tren peningkatan ekonomi nasional yang konsisten selama beberapa tahun terakhir, persoalan kemiskinan tetap menjadi isu krusial di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan kemiskinan di wilayah Jawa Barat bersifat kompleks dan multidimensional, yang mencakup faktor ekonomi, sosial, pendidikan, kurangnya kesempatan kerja, populasi yang besar, dan masalah kesehatan serta akses terhadap layanan dasar, sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang bersifat berkelanjutan dan terintegrasi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2024, Provinsi Jawa Barat mencatat populasi penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 3.848,67 ribu jiwa. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 3.888,6 ribu jiwa. Berbagai kebijakan dan program strategis telah diterapkan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menurunkan angka kemiskinan, namun hasil yang diperoleh belum sepenuhnya optimal. Salah satu inisiatif yang diupayakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara regional diarahkan pada kawasan industri Rebana yang mencakup wilayah Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Kawasan ini dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi infrastruktur, industri manufaktur, dan konektivitas logistik (Mubarak, 2023). Namun demikian, meskipun investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan Rebana meningkat, kerentanan ekonomi masyarakat maupun ketimpangan struktur sosial di wilayah tersebut masih menjadi persoalan mendasar.



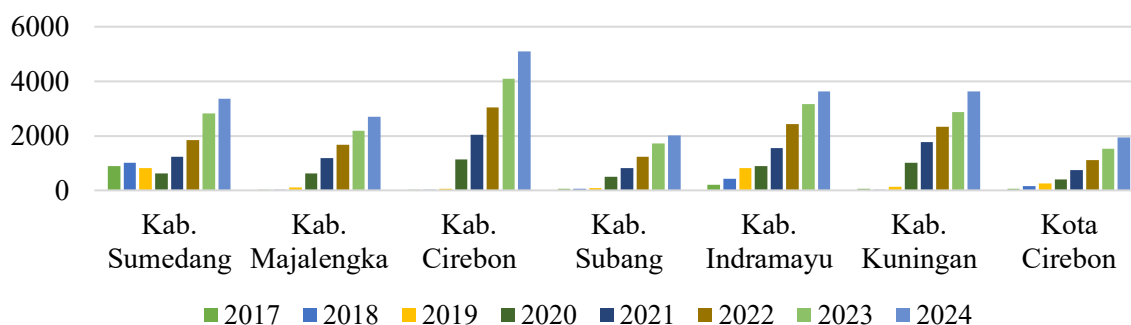
Gambar 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Wilayah Rebana Jawa Barat

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa angka Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Jawa Barat wilayah Rebana berbeda-beda di tiap tahunnya. Tingkat persentase kemiskinan (P1) di wilayah Rebana Jawa Barat tahun 2017-2024 nilai persentase paling

dominan terjadi di Kabupaten Indramayu yaitu mencapai 16.84 persen. Sedangkan untuk persentase tingkat kedalaman kemiskinan di wilayah Rebana Jawa Barat yang paling rendah terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yaitu sebesar 11.49 persen. Menurut Hanushek dan Woessmann (2008), terdapat hubungan kuat antara pendidikan dan strategi pengurangan kemiskinan. Negara dengan durasi pendidikan formal penduduk yang relatif lebih panjang umumnya menunjukkan besaran masyarakat dalam kondisi miskin cukup sedikit, karena pendidikan berperan dalam mengembangkan keterampilan guna memperkuat daya saing angkatan kerja.

Meski demikian, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi persoalan signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah inisiatif yaitu Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan implementasi konkret dari kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Negara Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah maupun kelompok yang memiliki kerentanan ekonomi supaya dapat mempermudah akses mereka terhadap layanan pendidikan (Sufni, 2024). Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pertamakali dilaksanakan pada 2014 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan bantuan pendidikan kepada siswa/i yang sudah berusia 6 sampai 21 tahun dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini diimplementasikan untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah serta memberikan bantuan yang fleksibel untuk menunjang berbagai kebutuhan pendidikan peserta didik, termasuk biaya awal masuk sekolah, buku, dan kebutuhan lainnya (Saputra *et al.*, 2025).

Program Indonesia Pintar (PIP) diimplementasikan melalui mekanisme penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditujukan kepada peserta didik dari rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan tujuan memperluas kesempatan mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan formal (Zamjani, 2019). Selanjutnya program KIP-K juga termasuk inisiatif otoritas publik dirancang agar dapat menciptakan akses yang lebih luas untuk mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk menempuh studi di perguruan tinggi. Inisiatif ini menyalurkan biaya kuliah serta uang saku guna meringankan beban ekonomi mahasiswa dan meningkatkan motivasi mereka dalam menyelesaikan studi (Meiriza *et al.*, 2024).



Gambar 2. Jumlah Penerima KIP-K Di Wilayah Rebana Jawa Barat

Berdasarkan data pada Gambar 2. diatas jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di wilayah Rebana Jawa Barat pada periode 2017-2024 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Total Penerima KIP-K di wilayah Rebana Jawa Barat dari tahun 2017-2024 terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu sebanyak 15.494 jiwa. Sedangkan daerah dengan jumlah penerima KIP-K wilayah Rebana paling rendah dari tahun 2017-2024 terjadi di Cirebon yaitu sebanyak 6.166 jiwa.

Penelitian ini akan berfokus pada dampak pengaruh dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terhadap

tingkat kemiskinan di Kawasan Rebana Jawa Barat. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti peran program-program tersebut dalam mengurangi kemiskinan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat yang putus sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2024) menemukan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Program Bantuan Iuran (PBI) dan PKH berpengaruh negatif dan juga signifikan pada kesejahteraan masyarakat pada periode yang sama. Sebaliknya, Program Sembako terbukti berkontribusi memperbaiki taraf hidup masyarakat. Berikutnya, riset yang dilaksanakan Maliangga *et al.* (2019) menemukan bahwa program KIP dan program KIS dapat membantu masyarakat pada tingkat pengeluaran rumah tangga kelompok ekonomi rendah. Dengan demikian, program tersebut mengindikasikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan dinamika dan fenomena yang telah dipaparkan, kajian ini dilaksanakan untuk menganalisis dan mengkaji lebih mendalam dampak Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) serta Belanja Modal Pendidikan (BMP) sebagai variabel moderasi terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) wilayah Rebana, Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, penelitian ini diberikan judul “Pengaruh Peningkatan Indikator Pendidikan Terhadap Kedalaman Kemiskinan dengan Belanja Modal Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi”.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menerapkan metode regresi data panel. Pemilihan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat dengan Belanja Modal Pendidikan (BMP) sebagai variabel moderasinya. Penelitian ini menggunakan data time series dalam rentang 2017–2024 yang meliputi 7 Kabupaten/Kota di wilayah Rebana Jawa Barat.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, dengan fokus utama menganalisis dan mengkaji faktor-faktor peningkatan indikator pendidikan yang diambil berdasarkan wilayah Rebana Jawa Barat yang terdiri dari 7 kab/kota, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, serta Kota Cirebon, dengan data penelitian dari tahun 2017–2024.

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, yaitu BPS dan Kemendikbudristek sebagai lembaga penyedia data resmi. Kajian ini memanfaatkan data panel sebagai landasan dalam proses analisis yang dibentuk dengan penggabungan dimensi waktu dan dimensi wilayah.

Teknik Analisa Data

Metode pengolahan dan analisis data dalam studi ini memiliki beberapa tahap. Pertama, dilakukan pengujian kelayakan model melalui Uji *Chow* dan Uji *Hausman*. Pemilihan model regresi dilakukan melalui Uji *Chow* untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* dengan menilai perbedaan varians residual. Selanjutnya, Uji *Hausman* digunakan sebagai dasar pemilihan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* berdasarkan signifikansi perbedaan estimasi parameter. Tahapan berikutnya meliputi pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Setelah itu, analisis regresi data panel diterapkan untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada tahap akhir, pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk melihat peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model

Tabel 1. Uji Chow

<u>Uji Chow</u>	<u>Statistic</u>	<u>d.f.</u>	<u>Prob.</u>
Cross-section F	2.002455	(6,45)	0.0851
Cross-section Chi-square	13.252243	6	0.0392

Sumber : Hasil olahan data penelitian (2025).

Dari perolehan pengujian Chow di atas menghasilkan nilai signifikansi *Cross-section Chi-square* yang diperoleh sebesar 0,0392, artinya berada di bawah batas tingkat kesalahan 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan *Fixed Effect Model* (FEM) ini merupakan model yang lebih sesuai dibandingkan model *Common Effect Model* (CEM). Dengan demikian, model yang dipilih berdasarkan tahapan penyelesaian model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 2. Uji Hausman

<u>Uji Hausman</u>	<u>Statistic</u>	<u>d.f.</u>	<u>Prob.</u>
Cross-section random	3.194119	4	0.5259

Sumber : Hasil olahan data penelitian (2025).

Perolehan pengujian *Hausman Test* didapatkan nilai probabilitas statistik *Cross-section* 0,5259. Nilai yang dihasilkan tersebut lebih tinggi dibandingkan batas acuan yang ditetapkan, yaitu $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Kondisi ini menandakan bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan model yang lebih tepat untuk diterapkan dalam studi ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas data, diperoleh nilai *probability* 0,710727. Hal ini disebabkan oleh nilai yang diperoleh besar dari tingkat signifikansi 0,05, artinya ketersediaan data dalam studi ini sudah normal dan bisa untuk dilakukan tahapan pengujian berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	RLS	PIP	KIPK	BMP
RLS	1.000000	-0.644691	0.120108	-0.800312
PIP	-0.644691	1.000000	0.409687	0.867955
KIPK	0.120108	0.409687	1.000000	0.260571
BMP	-0.800312	0.867955	0.260571	1.000000

Sumber : Hasil olahan data penelitian (2025).

Dari pengujian multikolenieritas, diperoleh nilai matriks korelasi yang menandakan bahwa semua variabel independen yang dianalisis memberikan kontribusi melalui koefisien yang terestimasi dalam model dengan korelasi di bawah 0,90. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada uji ini tidak ditemukan multikolineritas di antara variabel yang digunakan. Maka, semua variabel independen dinyatakan layak untuk digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0.181279	0.174996	-1.035902	0.3051
RLS	0.023741	0.017160	1.383474	0.1725
PIP	7.53E-13	8.65E-13	0.871125	0.3878
KIPK	-1.21E-12	7.84E-13	-1.544639	0.1286
BMP	1.36E-13	2.81E-13	0.483626	0.6307

Sumber : Hasil Olahan data Penelitian (2025)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, merujuk pada hasil tabel di atas, semua variabel independen yang digunakan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), serta Belanja Modal Pendidikan (BMP), menunjukkan nilai probabilitas di atas tingkat kesalahan. tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas pada variabel penelitian, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

	dL	dU
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.901570	1.4201 1.7246

Sumber : Hasil olahan data penelitian (EViews 10, 2025).

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,901570. Pada tingkat signifikansi 5% dengan 56 observasi dan 4 variabel independen, diperoleh nilai dL sebesar 1,4201 dan dU sebesar 1,7246, serta nilai 4-dU sebesar 2,2754. Posisi DW yang berada di antara dU dan 4-dU menandakan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Analisis Data Panel

Tabel 7. Hasil Regresi Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.369470	0.829356	5.268512	0.0000
RLS	-0.272847	0.081327	-3.354939	0.0015
PIP	-8.59E-12	4.10E-12	2.095374	0.0411
KIPK	3.13E-12	3.72E-12	0.840693	0.4044
BMP	-4.29E-12	1.33E-12	-3.220141	0.0022
R-squared	0.261258	Mean dependent var		1.714643
Adjusted R-squared	0.203318	S.D. dependent var		0.392868

Sumber : Hasil olahan data penelitian (2025).

Berdasarkan hasil pengujian parsial (Uji t) menggunakan model terbaik maka di simpulkan sebagai berikut: 1) Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menghasilkan nilai probabilitas 0,0015. Nilai yang didapatkan berada di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). 2) Hasil pengujian data memperlihatkan bahwa variabel Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki nilai probabilitas 0,0411, yang lebih rendah pada tingkat signifikansi 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). 3) Hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai probabilitas variabel Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) adalah 0,4044, yang melebihi batas signifikansi 5%. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa KIP-K tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). 4) Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal Pendidikan (BMP) memiliki nilai probabilitas 0,0022, yang berada di bawah batas signifikansi 5%.

Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.403251	2.318316	-0.173941	0.8626
RLS	-0.175059	0.217277	0.805693	0.0044
PIP	-2.35E-11	1.52E-11	-1.549422	0.0174
KIPK	4.24E-11	1.58E-11	2.691173	0.7398
BMP	-1.17E-11	7.92E-12	1.481369	0.1450
RLS_BMP	-1.53E-12	8.17E-13	-1.869844	0.0676
PIP_BMP	-1.05E-22	4.73E-23	-2.226768	0.0307
KIPK_BMP	8.16E-23	4.55E-23	1.794818	0.0790

Sumber : Hasil olahan data penelitian (EViews 10, 2025).

Hasil uji regresi moderasi sebagaimana ditampilkan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa koefisien yang diperoleh bernilai $-1.53E-12$ dengan hasil prob $0,0676$, lebih tinggi dari tingkat signifikansi $0,05$. Dengan demikian, hasil tersebut mmengartikan variabel Belanja Modal Pendidikan (BMP) tidak terbukti memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). 2) Hasil pengujian moderasi diperoleh koefisien sebesar $-1.05E-22$ dengan nilai probabilitas $0,0307$. Angka tersebut berada di bawah ambang signifikansi 5% , yang menunjukkan adanya signifikansi statistik pada variabel moderasi yang diuji. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh interaksi antara Belanja Modal Pendidikan (BMP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) bersifat signifikan. Oleh karena itu, Belanja Modal Pendidikan (BMP) terbukti mampu memoderasi hubungan antara Program Indonesia Pintar (PIP) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). 3) Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien yang dihasilkan adalah sebesar $8.16E-23$ dengan nilai prob. $0,0790$. Dengan probabilitas yang melampaui ambang signifikansi $0,05\%$, interaksi antarvariabel yang diuji tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Belanja Modal Pendidikan (BMP) tidak terbukti memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK).

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji *Common Effect Model* (CEM), variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat. Hal ini didukung oleh nilai *prob* pada uji t sebesar $0.0015 < \text{tingkat kesalahan } 0.05\%$. Hal ini selaras dengan teori yang dignakan yaitu peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dapat memperkecil tingkat kemiskinan dan kedalamannya dikarenakan semakin tinggi kualitas pendidikan yang dimiliki, semakin terbuka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan yang dimilikinya, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan (Hanushek dan Woessmann, 2008). Dengan adanya kawasan ekonomi baru, tingkat Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi komponen atau indikator penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, tingkat lamanya pendidikan masyarakat menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut. Pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga memperbesar peluang penduduk miskin untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas ekonomi modern, baik di sektor formal maupun informal.

Pengaruh Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan, Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat. Sejalan dengan temuan, Zamjani (2019) penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan oleh pemerintah kepada siswa/i dari latar belakang keluarga yang rentan secara ekonomi agar bisa melanjutkan sekolah sangat berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan Program Indonesia Pintar (PIP) membantu meringankan beban kemiskinan ekstrem meskipun skalanya kecil secara langsung terhadap total pengeluaran per kapita penduduk miskin. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan afirmatif berbasis pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) masih relevan dan dibutuhkan, terutama bagi masyarakat miskin yang rentan tertinggal di tengah ekspansi industri dan infrastruktur. Dengan memperluas jangkauan dan efektivitas implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di daerah-daerah dengan akses pendidikan rendah, pemerintah dapat memperkuat daya ungkit kebijakan sosial dalam menurunkan angka kemsikinan maupun kesenjangan sosial yang pada akhirnya mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sama dengan Pangga dan Yuliawan (2025) menyatakan bahwa program PIP berpengaruh negative dan signifikan pada penanggulangan kemiskinan.

Pengaruh Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian data Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tidak berpengaruh terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat. Hasil ini didukung dengan nilai prob pada uji t-statistik sebesar 0.4044 yang nilainya lebih dari tingkat kesalahan 0.05. Meskipun Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) difokuskan sebagai upaya agar membuka akses yang lebih luas bagi mahasiswa dari latar belakang keluarga berpenghasilan rendah untuk bisa mengenyai pendidikan di pendidikan tinggi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program ini belum berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah Rebana. Kondisi tersebut dikarenakan bahwa masih terdapat penerima manfaat program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang bukan dari golongan ekonomi rentan dan dipangan masih banyak penerima KIP-K menyalahgunakan bantuan tersebut untuk memenuhi hasrat hedonisme.

Kondisi tersebut mengilustrasikan bahwa penanganan kemiskinan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh berbagai persoalan sosial yang saling berkaitan. Tekanan dari lingkungan sekitar, dinamika kehidupan di kampus, pengaruh konten media sosial, serta keterbatasan kemampuan dalam mengelola keuangan menjadi faktor yang dapat memicu munculnya pola hidup konsumtif. Perilaku tersebut sering kali tidak selaras dengan kapasitas finansial yang dimiliki, sehingga memperumit upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana serta ketidaktepatan sasaran program, seperti jual beli kuota penerima, pemotongan dana tunjangan dan masih banyak penerima manfaat program KIP-K dari prodi/jurusan perkuliahan yang tidak memiliki prospek kerja tinggi atau kelebihan pasokan tenaga kerja di wilayah Rebana Jawa Barat. Temuan ini selaras dengan temuan Ardianty (2024) menemukan masih terdapat penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menyalahgunakan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang tak sesuai tujuan pendidikan.

Pengaruh Belanja Modal Pendidikan (BMP) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian data untuk variabel Belanja Modal Pendidikan (BMP) memiliki pengaruh yang negatif namun signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat didukung dengan nilai prob pada uji t pada tabel 4.13 sebesar 0.0022 kecil 0.05. Pengaruh negatif tersebut berarti bahwa semakin tinggi anggaran Belanja Modal Pendidikan (BMP) yang disalurkan, maka dapat menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). Dengan kata lain, semakin besar investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur pendidikan, semakin menipis gap antara rata-rata pengeluaran kelompok miskin dan garis kemiskinan. Sejalan dengan pendapat dari Haryanto (2018) berpendapat bahwa belanja pemerintah mencerminkan arah kebijakan fiskal yang diambil, di mana besarnya alokasi anggaran pada suatu sektor menunjukkan tingkat prioritas dan komitmen pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam sektor tersebut. Sehingga dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui Belanja Modal Pendidikan (BMP) yang berperan dalam memperbaiki fasilitas belajar, meningkatkan kenyamanan, dan memperluas cakupan layanan pendidikan ke wilayah-wilayah tertinggal.

Belanja Modal Pendidikan (BMP) bukan hanya pengeluaran rutin birokrasi, melainkan alat strategis pengentasan kemiskinan, terutama yang bersifat struktural dan multidimensional. Pada saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan Belanja Modal Pendidikan (BMP) secara signifikan termasuk pembangunan sekolah baru, laboratorium dan fasilitas digital khususnya untuk di wilayah Rebana yang tengah di kembangkan sebagai kawasan strategis nasional. Bukan hanya itu saja dalam alokasi Belanja Modal Pendidikan (BMP) pemerintah di Provinsi Jawa Barat mempersempit kesenjangan dan memperbesar peluang

sosial ekonomi bagi keluarga miskin melalui pemerataan alokasi Belanja Modal Pendidikan (BMP) di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Rachman (2024), yang mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berperan penting dalam menekan tingkat kemiskinan. Namun demikian, hasil ini justru berbeda dengan Demak (2020) yang menemukan bahwa BMP atau pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, meskipun arahnya negatif.

Pengaruh Belanja Modal Pendidikan sebagai Variabel yang Memoderasi Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi, nilai koefisien dan nilai probabilitas $RLS*BMP$ atau interaksi antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dengan Belanja Modal Pendidikan (BMP) sebesar $-1.53E-12$ dan probabilitas sebesar $0.0676 > 0.05$. Sehingga dapat diambil artian bahwa Belanja Modal Pendidikan belum mampu memoderasi pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Astuti *et al.* (2023) mengungkapkan belanja pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dengan IPM sebagai variabel dependennya. Belanja Modal Pendidikan (BMP) tidak mampu memoderasi hubungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan. Artinya, meskipun pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Belanja Modal Pendidikan (IKK) ke wilayah Rebana, hasilnya tidak serta merta berdampak pada pengurangan kemiskinan apabila lulusan pendidikan tidak diserap ke dalam sektor kerja formal atau produktif. Hal ini menunjukkan adanya *mismatch* antara peningkatan tingkat pendidikan dengan kesiapan sektor ekonomi lokal dalam menyerap tenaga kerja terdidik. Wilayah Rebana sebagai kawasan pengembangan ekonomi baru masih berada dalam tahap awal pembangunan industri dan infrastruktur, sehingga belum mampu menampung secara optimal tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi. Selain itu, persebaran Belanja Modal Pendidikan (BMP) yang mungkin belum merata dan tidak diarahkan pada aspek strategis seperti pelatihan vokasi, penguatan SMK, atau sinergi dengan kebutuhan industri lokal, turut memperlemah efektivitasnya dalam memoderasi hubungan antara pendidikan dan kemiskinan.

Belanja Modal Pendidikan sebagai Variabel yang Memoderasi Hubungan Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi diperoleh nilai koefisien dan nilai probabilitas $PIP*BMP$ atau interaksi antara Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Belanja Modal Pendidikan (BMP) sebesar $-1.05E-22$ dan *prob.* hanya 0.0307 lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat mengartikan variabel Belanja Modal Pendidikan (BMP) mampu memoderasi pengaruh Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) secara signifikan. Artinya keberadaan Belanja Modal Pendidikan (BMP) memperkuat pengaruh dari Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat. Peningkatan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang didukung dengan implementasi Belanja Modal Pendidikan (BMP) yang tepat seperti pembangunan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu kelompok masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dasar yang berkelanjutan, ditopang oleh lingkungan belajar yang memadai, membuka akses yang lebih luas bagi anak-anak miskin dalam menempuh jenjang pendidikan lanjutan dan mempunyai skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Melati *et al.* (2021) menegaskan bahwa semakin meningkatnya alokasi dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk sektor pendidikan, maka semakin luas pula akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan.

Pengaruh Belanja Modal Pendidikan sebagai Variabel yang Memoderasi Hubungan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Hasil pengujian dengan pendekatan MRA (*Moderated Regression Analysis*) menunjukkan nilai koefisien serta probabilitas dari interaksi variabel KIPK*BMP atau interaksi antara Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dengan Belanja Modal Pendidikan (BMP) sebesar $8.16E-23$ dan prob. sebesar 0.0790 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Belanja Modal Pendidikan (BMP) tidak mampu memoderasi pengaruh Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). Artinya, Belanja Modal Pendidikan (BMP) masih belum sinergis dalam aspek sasaran dan wilayah dalam memperkuat efek moderasi. Hal ini perlu ada penyesuaian kebijakan agar Belanja Modal Pendidikan (BMP) lebih mendukung secara langsung keberhasilan program bantuan pendidikan tinggi dan keterhubungannya dengan pengentasan kemiskinan antara anggaran Belanja Modal Pendidikan (BMP) yang disalurkan dengan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dalam menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK). Meskipun adanya peningkatan Belanja Modal Pendidikan (BMP), dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan melalui Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di wilayah Rebana Jawa Barat masih terbatas. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Pangga dan Yuliawan (2025) yang menemukan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, Darwin Hartono (2023) menemukan bahwa realisasi anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Belanja Modal Pendidikan (BMP) berpengaruh negatif serta signifikan dalam menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di wilayah Rebana Jawa Barat. Sebaliknya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tidak memberikan pengaruh signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan sasaran penerima, perilaku konsumtif, dan keterbatasan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Peran BMP sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh PIP terhadap penurunan kemiskinan, tetapi tidak mampu memoderasi hubungan antara RLS dan KIP-K dengan IKK. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan dan kebijakan afirmatif berbasis pendidikan dalam mengurangi kedalaman kemiskinan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran program, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta pemerataan alokasi anggaran pendidikan.

SARAN

Mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan dengan program pengentasan kemiskinan, seperti program BLT, Program PKH, atau Program KIS, serta memperluas lokasi penelitian ke wilayah lain di Jawa Barat maupun provinsi berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu mengevaluasi desain dan implementasi Program KIP-K dengan meningkatkan ketepatan sasaran penerima, memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta menjamin agar bantuan diterima oleh keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran utama.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianty, I. D., Febriyanto, S., Putri, R. A. C. D. A., Cahyani, A. P. R., & Djasuli, M. (2024). Penyalahgunaan Dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan dampaknya terhadap

- pendidikan di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 28–36. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1193>
- Astuti, A. P., Dwi, A., & Bawono, B. (2023). The effect of education expenditure as a moderating variable on factor influence HDI (Study on districts/cities in the provinces of Java-Bali in 2018–2020). *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 6(3), 56–62.
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A., & Londa, A. T. (2020). Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja modal dan inflasi terhadap kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(1).
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. *Journal of Economic Literature*, 46(3), 607–668.
- Meiriza, M. S., Sihotang, S. E. A., Mardiah, S., Zahara, D. A., & Al Mas, K. U. (2024). Pengaruh KIPK Terhadap Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Universitas Negeri Medan 2023. *Jurnal Literasi Indonesia*, 1(5), 188–196.
- Maliangga, M., Walewangko, E. N., & Londa, A. T. (2019). Pengaruh kebijakan pemerintah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terhadap konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(1).
- Melati M, A., Sudrajat, & Dian Imanina Burhany. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Mubarak, Z. (2023). *Web-Based Spatial Information System for Fisheries Potential in Cirebon Regency*. *Cebong Journal*, 2(3), 95-100.
- Pamungkas, D. C. (2024). Analisis Pengaruh Program Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023. (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar). *Universitas Tidar*, 124.
- Pangga, D. R. D., & Yuliawan, D. (2025). *Analysis of the Indonesia Smart Card Program (KIP) and Indonesia Healthy Card Program (KIS) on poverty reduction in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 29(1), 432–443.
- Prasetyowati, Y. W., & Haryanto, T. (2018). Determinan Efisiensi Teknis Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2(2), 47-55.
- Rachman, A. M. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 277-288.
- Saputra, E. I. & Yuliana (2025). Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5(2).
- Sufni, N. (2024). Analisis keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 2(2), 38–45. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i2.393>
- Takasaping, S. C., Rotinsulu, T. O. & Naukoko, A. T. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 97–108.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). *Pearson Education*.
- Zubir, E., Hartono, D., & Kharis, S. A. A. (2023). Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan dan Pariwisata Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1397-1404.